

Jurnal Akuntansi

TAHUN XIV/01/Januari/2010

ISSN : 1410 - 3591

Pengaruh Tingkat Pendidikan Auditor, Besarnya KAP Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kepuasan Kerja Auditor Dan Implikasinya Pada Kualitas Audit (Survei pada KAP di Jakarta)

✍ *Ida Rosnidah*

Model Strategi Manajemen Laba Pada Perusahaan Publik Di Bursa Efek Indonesia: Suatu Pemeriksaan Pergeseran Klasifikasi Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Saham, Pemilihan Metoda Akuntansi Dan Pengaturan Waktu Transaksi

✍ *Rahmawati, Anastasia Riani Suprpti, Sri Seventi*

Pengaruh *Restatement* Laporan Keuangan Dan Manajemen Laba Terhadap Kualitas Laba Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi

✍ *Nunung Nuryani*

Implikasi Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Bank

✍ *Leni & Rosmita Rasyid*

Prospek Kelayakan Penentuan *Cost Of Services And Charging Of Services* Di Sektor Publik Dengan Menggunakan *Activity Based Costing*

✍ *Nunuy Nur Afiah*

Analisis Atas Pengaruh Terjadinya *Stock Split* Terhadap Harga Saham, Volume Perdagangan Saham Dan Persentase *Spread* (Studi Empiris Di BEI)

✍ *Sri Daryanti & Ratna Dewi*

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat *Leverage*, Komite Audit Dan *Disclosure* Terhadap *Earnings Response Coefficient* Pada Perusahaan Publik Yang Terdaftar Di BEI

✍ *Syanti Dewi*

Analisis Penerapan PSAK No. 30 (Revisi 2007) Tentang Sewa Guna Usaha Pada PT "X"

✍ *Sparta & Deavnty Safitri*

Pengaruh Karakteristik Individu Wajib Pajak, Karakteristik Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak

✍ *Waluyo*

Accrual Budgeting Dan *Accrual Accounting* Pada Pemerintahan NKRI

✍ *Jan Hoesada*

Jurnal Akuntansi	Tahun XIV	Nomor 01	Hlm. 1 - 124	Jakarta, Januari 2010	ISSN 1410 - 3591
------------------	-----------	----------	--------------	-----------------------	------------------

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN AUDITOR, BESARNYA KAP DAN
PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEPUASAN
KERJA AUDITOR DAN IMPLIKASINYA PADA KUALITAS AUDIT
(Survei pada KAP di Jakarta)

Ida Rosnidah

1-10

MODEL STRATEGI MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PUBLIK
DI BURSA EFEK INDONESIA: SUATU PEMERIKSAAN PERGESERAN
KLASIFIKASI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA SAHAM,
PEMILIHAN METODA AKUNTANSI DAN PENGATURAN WAKTU
TRANSAKSI

Rahmawati, Anastasia Riani Suprapti, Sri Seventi

11-24

PENGARUH *RESTATEMENT* LAPORAN KEUANGAN DAN
MANAJEMEN LABA TERHADAP KUALITAS LABA DENGAN KUALITAS
AUDIT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Nunung Nuryani

25-37

IMPLIKASI PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN BANK

Leni & Rosmita Rasyid

38-53

PROSPEK KELAYAKAN PENENTUAN *COST OF SERVICES AND*
CHARGING OF SERVICES DI SEKTOR PUBLIK DENGAN
MENGUNAKAN *ACTIVITY BASED COSTING*

Nunuy Nur Afiah

54-61

ANALISIS ATAS PENGARUH TERJADINYA *STOCK SPLIT* TERHADAP
HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN
PERSENTASE *SPREAD* (STUDI EMPIRIS DI BEI)

Sri Daryanti & Ratna Dewi

.....

62-74

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, TINGKAT *LEVERAGE*, KOMITE
AUDIT DAN *DISCLOSURE* TERHADAP *EARNINGS RESPONSE*
COEFICIENT PADA PERUSAHAAN PUBLIK YANG TERDAFTAR DI BEI

Syanti Dewi

.....

75-87

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 30 (REVISI 2007) TENTANG SEWA
GUNA USAHA PADA PT "X"

Sparta & Deavnty Safitri

.....

88-97

PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU WAJIB PAJAK,
KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK

Waluyo

.....

98-112

ACCRUAL BUDGETING DAN *ACCRUAL ACCOUNTING*

Pada Pemerintahan NKRI

Jan Hoesada

.....

113-124

60

PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU WAJIB PAJAK,
KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK

Kusnadi, S. H. (Penulis)
Widyaiswara
Gagasan dan Ide-ide dalam perpajakan

Abstract: Having role as a potential source of government income, tax revenue is expected to increase every year. Therefore, in order to reach the goal, the General Directorate of Tax tries to apply taxation system perfectly which is also as one of the form of reformation on taxation.

In early 1984, the system of Indonesian taxation changed from the Official Assessment System to Self Assessment System. The alteration is aimed to trigger people involvement on taxation create tax compliance. Unfortunately, recent national data of taxation indicates that the level of tax compliance is still low. This lead the author to carry out study upon 102 tax payers registered at The Go Public District Tax Office as well as at Stock Exchange in Jakarta.

The Study is then intended to find out: (1) the dominant factors affecting characteristic of individual tax payer; (2) the dominant factors affecting characteristic of the companies; (3) the dominant factors affecting structure of ownership; (4) the influential level of characteristics of individual tax payer and of the companies as well as the structure of ownership upon tax compliance partially or simultaneously.

It is shown from descriptive and verificative study that the level of tax compliance is affected by characteristics of individual tax payer is as much as 44,1%, by characteristics of companies for 35,3%, and by the structure of ownership as much as 24,5%. Furthermore, the level of tax compliance is affected by the characteristics of individual tax payer and of the companies as well as the structure of ownership simultaneously as much as 74,9%, but 24,1% affected other factors.

Keywords: characteristic of individual tax payer, characteristic of the companies, the structure of ownership, tax compliance.

PENDAHULUAN

Untuk mengurangi ketergantungan sumber finansial eksternal, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal yaitu bersumber dari penerimaan dalam negeri. Sumber pembiayaan pembangunan internal berasal dari penerimaan migas dan non migas yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan dalam negeri dari sektor migas peranannya semakin menurun sebagai akibat jumlah atau *volume* penjualan telah ditentukan berdasarkan kuota. Harga migas pun sangat tergantung pada harga migas di pasaran internasional.

* Program Studi Pascasarjana Universitas Mercu Buana dan Program MAKSI/PPAk Universitas Tarumanagara (Almt: Jl. Tanjung Duren Utara No. 1 Jakarta Barat 11470, Email: waluyo6@pajak.co.id)

Tahun 2000 pemerintah Indonesia bersama *International Monetary Fund* (IMF) telah bertekad untuk memperbaiki kinerja pemerintah di berbagai bidang termasuk di dalamnya bidang perpajakan yang menjadi perhatian sentral. Oleh karenanya dalam rangka pemenuhan pembiayaan negara baik untuk belanja rutin maupun pembangunan, sumber penerimaan dalam negeri di luar migas semakin ditingkatkan melalui peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Oleh karena itulah diperlukan reformasi perpajakan.

Dengan reformasi pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum sehingga masyarakat wajib pajak dengan sukarela memenuhi kewajiban pajaknya. Tanggung jawab serta kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada masyarakat wajib pajak dan masyarakat diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang atau *self assesment system*.

Kunci utama sistem pemungutan pajak dengan *self assesment* adalah pada kepatuhan wajib pajak. Penciptaan kepatuhan mudah dilakukan melalui penegakan hukum baik berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan dengan menempatkan wajib pajak sebagai subjek yang dihargai hak dan kewajibannya.

Demikian halnya upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan sistem *self assesment* perlu diikuti dengan tindakan pengawasan agar tercapai sasaran kebijaksanaan perpajakan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai strategi komprehensif antara lain melalui pemeriksaan pajak (Brooks, 2001). Pendapat Yudkin (1991) menyatakan bahwa sistem perpajakan harus memberikan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran materiil dan formal yang bersumber dari Surat Pemberitahuan (SPT). Seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang pajak, tujuan utama pemeriksaan pajak pada prinsipnya dimaksudkan untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak. Dari sisi perusahaan sebagai wajib pajak, gambaran pertanggungjawaban keuangan wajib pajak tercermin dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengujian atas kelayakan laporan keuangan. Pengujian tersebut tidak terbatas pada kelayakannya saja tetapi juga meliputi tingkat kepatuhan melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan melalui proses pemeriksaan pajak. Alm et. al (2004) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap individu yang diperiksa tetapi juga mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap individu yang tidak diperiksa. Di pihak lain pengukuran kinerja dengan mendasarkan pada *tax ratio* yaitu dengan membandingkan jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan pihak otoritas pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) masih rendah dibandingkan dengan *tax ratio* negara lain di Asia.

Tuntutan transparansi masyarakat pembayar pajak dalam kaitannya dengan tujuan ketaatan pajak seperti penelitian yang dilakukan Rice (1992) mengenai karakteristik perusahaan dan kepatuhan pajak mengatakan bahwa persyaratan pengungkapan sebagai wujud transparansi kepada publik dapat mendorong kepatuhan pajak. Memperhatikan fenomena rendahnya kepatuhan pajak para wajib pajak di Indonesia, khususnya terhadap wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa, sehingga perusahaan tersebut sangat menarik untuk meneliti pengaruh dominan yang membentuk karakteristik individu wajib pajak, karakteristik perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang Penelitian, maka dapat dirumuskan masalah-masalah meliputi : Faktor apakah yang dominan membentuk karakteristik individu wajib pajak, karakteristik perusahaan, struktur kepemilikan, dan seberapa besar karakteristik individu wajib pajak, karakteristik perusahaan, dan struktur kepemilikan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak baik secara parsial maupun simultan.

Dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh karakteristik individu wajib pajak, karakteristik perusahaan, dan struktur kepemilikan secara keseluruhan terhadap kepatuhan pajak.

Karakteristik Individu Wajib Pajak. Pada penelitian ini variabel karakteristik individu yang dimaksud yaitu karakteristik individu wajib pajak. Menurut Jones (2004) pengertian wajib pajak yaitu seseorang atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar pajak kepada negara sebagai otoritas pajak. Faktor-faktor yang membentuk karakteristik individu wajib pajak yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi : (1). Kualifikasi Pendidikan, sesuai pendapat Grace et al (1995) bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran status profesionalisme individu. Dalam perusahaan berskala besar umumnya dewan direksinya terdiri dari individu-individu yang berlatar belakang pendidikan bisnis dan akuntansi. Sedangkan pendidikan perpajakan hanya dalam bentuk pelatihan. (2). Hubungan keluarga, Pendapat Perera et al (1990) bahwa pada saat para anggota keluarga terlibat dalam melakukan pengawasan perusahaan, anggota keluarga tidak merasakan adanya kewajiban terhadap publik atau masyarakat, dan kecenderungannya lebih banyak mendorong untuk mempengaruhi manajemen tidak transparan atau patuh. (3). Pemahaman Wajib Pajak merupakan tipe hasil belajar yang lebih tinggi dibanding pengetahuan. (4). Penggunaan Teknologi Informasi, pada perusahaan yang berskala besar umumnya mengolah data untuk menjadi informasi menggunakan perangkat teknologi komputer. Hung Chan et al (2000) berpendapat bahwa penggunaan teknologi informasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. (5). Komunikasi, Studi yang dilakukan Alm et al (2002) menyimpulkan bahwa faktor komunikasi dapat meningkatkan kepatuhan Pajak.

Karakteristik Perusahaan. Faktor-faktor dalam karakteristik perusahaan yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi (1). Ukuran Perusahaan, untuk perusahaan berskala besar akan mempunyai pengaruh yang lebih besar pada masyarakat dan berorientasi pada pasar modal dan hal ini lebih mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dalam pengungkapan informasinya (Schipper, 1981; Mc Kinnon et al. 1993). (2). Kemampulabaan (*profitability*) merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Kemampulabaan ini banyak digunakan sebagai variabel penjelas pada penelitian atas pengungkapan sukarela. Lang et al (1993) berpendapat bahwa pada studi secara teoritis dan empiris terdapat ambiguitas yang mengacu pada tingkat laba yang berkenaan dengan pengungkapan sukarela. (3). *Leverage*, Pendapat Jensen dan Meckling (1976) bahwa perusahaan dengan *leverage ratio* yang tinggi akan menyediakan informasi yang lebih luas dan rinci kepada manajemen, terutama untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi kreditur dibanding dengan perusahaan dengan *leverage ratio* yang rendah. (4). Masa Terdaftar, pada saat pendiriannya memang wajib pajak masuk bursa ini terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu dan mencatatkan diri pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) dalam Pasar Sekunder (*Secondary Market*). (5). Kompleksitas Usaha, tingkat kompleksitas usaha dimaksudkan sebagai keterkaitan dengan tingkat kerumitannya

dalam pengelolaan perusahaan dan pengendaliannya. Perusahaan yang mempunyai banyak cabang usaha umumnya mempunyai masalah perpajakan yang lebih kompleks.

Struktur Kepemilikan. Faktor-faktor dalam struktur kepemilikan yang akan digunakan dalam penelitian yaitu struktur kepemilikan yang meliputi : (1). Kepemilikan Publik atau Pribadi. Pendapat El Gazzar (1998) menyatakan kepemilikan institusi yang besar akan meningkatkan pengungkapan sukarela. Sejalan dengan penciptaan kepatuhan perpajakan membutuhkan informasi yang lebih dibanding perusahaan dalam kepemilikan individu. (2). Kepemilikan Asing, dengan semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang kondisi perusahaan, maka semakin banyak tuntutan informasi rinci atau pengungkapan yang lebih luas.

Kepatuhan Pajak. Kepatuhan Pajak diberikan batasan yang lebih sederhana adalah kepatuhan pajak terhadap Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan. Kemudian pengertian Kepatuhan Pajak dalam *International Tax Glossary* (1992) adalah tingkatan yang menunjukkan wajib pajak patuh atau tidak patuh terhadap aturan pajak di negaranya, sebagai contoh dalam melaporkan penghasilan dalam Surat Pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan dalam jadwal waktu yang telah ditetapkan. Hasseldine (1993) menyatakan juga bahwa kepatuhan dimaksudkan adalah kepatuhan melaporkan semua harta kekayaan wajib pajak yang tercatat pada waktu yang telah ditentukan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pajak secara akurat sesuai dengan peraturan.

Demikian halnya pengertian kepatuhan menurut Milgram sebagaimana dikutip Koeswara (1998) adalah kepatuhan kepada otoritas atau aturan-aturan. Kepatuhan dalam hubungannya dengan perpajakan dapat diartikan sebagai tingkatan wajib pajak dalam mematuhi undang-undang perpajakan (Hom, 1999). Kepatuhan inilah selanjutnya menunjukkan kekuatan yang mempengaruhi individu secara implisit. Masalah kepatuhan pajak sebagai masalah yang melekat pada perpajakan itu sendiri. Oleh karena itulah mengkarakteristikan dan menjelaskan pola-pola ketidakpatuhan dan menemukan cara untuk mengurangi ketidakpatuhan sebagai hal yang sangat penting yang dapat didekati dari berbagai perspektif sebagai contoh dari sisi keuangan atau penegakan hukum (Andreoni et al, 1998).

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa kepatuhan pajak sebagai kepatuhan terhadap pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai undang-undang pajak dan aturan pelaksanaannya. Kepatuhan yang diharapkan dalam *self assessment* adalah kepatuhan sukarela dan bukan kepatuhan yang dipaksakan. Sedangkan tingkat kepatuhan dapat didefinisikan sebagai pemahaman individu terhadap tindakan yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Individu akan cenderung mengembangkan kepatuhan yang kuat terhadap tindakan dengan persepsi baik atau penting. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak menurut Silvani (1992) diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan dan pelayanan terhadap wajib pajak yang baik dan cepat.

Araujo (1995) berpendapat bahwa yang mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban dengan tepat waktu dan secara sukarela karena adanya pengelolaan pajak yang efisien. Menurut Gunadi (2004), tulang punggung sistem *self assessment* adalah kepatuhan pajak dari masyarakat wajib pajak. Pengukuran tingkat kepatuhan dapat dilakukan dengan menggunakan *tax gap* yaitu perbedaan antara penerimaan pajak yang sebenarnya dengan penerimaan pajak yang akan diterima dalam kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak

mencapai 100 (seratus) persen. Pendapat lainnya seperti Mangkusoebroto (1994) menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya tidak memberikan kepercayaan terlalu besar terhadap sistem *self assessment* yang mengharuskan agar wajib pajak bersedia menyatakan jumlah dengan jujur dan transparan.

Aspek yang tercakup dalam upaya perbaikan kinerja bidang perpajakan sangatlah komplek. Salah satu yang telah ditindak lanjuti adalah menyempurnakan perundang-undangan perpajakan yang telah ada agar memenuhi prinsip-prinsip perpajakan yang dianut, yaitu berbasis luas, tidak mengandung distorsi dalam penerapannya, dan berkeadilan. Konsep perpajakan yang menempatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama sistem perpajakan dan keberhasilan penerapannya bergantung pada kesadaran dan kerelaan masyarakat untuk berperan aktif dalam sistem perpajakan, sehingga kepatuhan pajak menjadi faktor yang penting dalam mendukung keberhasilan sistem *self assessment*. Sistem ini sebagai pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia juga sebagai upaya peningkatan kepatuhan pajak (Silvany, 1992). Secara tradisional, metode pendorong kepatuhan pajak (Jenkins and Forlemu, 1992) antara lain yaitu : (1) *self assessment* yang dibarengi dengan penegakan hukum secara *random* dengan tegas ; dan (2) administrasi *assessment* atas semua surat pemberitahuan pajak. Pendapat Felber (2003) menyampaikan bahwa untuk tujuan pemenuhan penerimaan pajak tetap mengedepankan kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang mengarah kepada prinsip-prinsip antara lain adanya landasan dan kepastian hukum (*rule of law*), adanya semangat transparansi baik dari administrasi perpajakan, maupun masyarakat wajib pajak yang terkait dengan sistem perpajakan. Dimensi transparansi ini menurut Ida (2003) meliputi : (1) ketersediaan dan dapat diaksesnya informasi; (2) kejelasan peran dan tanggung jawab diantara dan dalam lembaga terkait; dan (3) sistem dan kapasitas produksi serta jaminan informasi yang sistematis. Transparansi dalam proses pemajakan selain pembuatan kebijakan termasuk keterbukaan informasi masyarakat wajib pajak. Untuk membangun transparansi perpajakan inilah dari sisi masyarakat wajib pajak mendorong adanya kepatuhan pajak (*tax compliance*) dan pelaksanaan *good corporate governance* dalam usaha atau kegiatan pembayar pajak (Jenkins dan Forlemu, 1992). Dengan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan menjadi penggerak utama juga terhadap kepatuhan pajak (Toshiyuki, 2001).

Sebagai teori utama (*grand theory*) dalam penelitian ini yaitu teori perusahaan (*enterprise theory*). Dalam teori ini, perusahaan sebagai entitas yang menjalankan kegiatan usaha untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang berkepentingan tersebut seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah dan masyarakat, sehingga perusahaan sebagai entitas usaha memiliki tanggung jawab ekonomi dan sosial (Porwal, 2002).

Penggunaan teori *stewardship* sebagai *middle range theory* sebagaimana dikemukakan Donalson et al (1999) bahwa manajemen sebagai *steward* akan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Manajemen bertindak didasarkan pertimbangan rasional. Sedangkan dalam *Applied Theory* menggunakan *Agency Theory* memberikan acuan bahwa perusahaan atau wajib pajak besar kecenderungannya lebih transparan dibandingkan dengan wajib pajak dengan lingkup usahanya yang kecil (Jensen et al, 1976). Tetapi dalam teori *signal (signaling theory)* membahas bagaimana seharusnya *signal* keberhasilan ataupun kegagalan manajemen (agen) untuk disampaikan kepada pemilik (*principal*), sehingga laporan keuangan dipandang sebagai *signal* apakah agen telah melaksanakan kewajiban secara optimal. Penerapan teori *signal* ini dalam bidang perpajakan yaitu dengan memperhatikan *signal-signal* perilaku individu wajib pajak untuk mengukur

kepatuhan pajaknya. Penggunaan *signal* ini dapat diaplikasikan dalam pemeriksaan pajak yang disampaikan Ines Macho – Stadler et al – Castrillp (2000). Teori lainnya sebagai pendukung yaitu teori perilaku organisasi seperti yang disampaikan Robbins (2007) bahwa struktur organisasi memiliki beberapa komponen meliputi formalitas dan sentralisasi.

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang harus diuji atau dibuktikan kebenarannya (Sekaran, 2003). Hipotesis tersebut harus didukung oleh premis-premis yaitu sesuatu yang dianggap benar atau tidak dipersoalkan benar salahnya yang berfungsi sebagai deduksi dan bersifat non *empirical* (Herman Soewardi, 2000). Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran, dapat dirumuskan hipotesis penelitian meliputi : **Hipotesis 1:** Faktor komunikasi dominan membentuk karakteristik individu wajib pajak; **Hipotesis 2:** Faktor kemampuan dominan membentuk karakteristik perusahaan; **Hipotesis 3:** Faktor kepemilikan asing dominan membentuk struktur kepemilikan; **Hipotesis 4:** Faktor-faktor dari karakteristik individu wajib pajak, karakteristik perusahaan, struktur kepemilikan, secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE

Objek Penelitian. Perusahaan sebagai wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Masuk Bursa merupakan unit analisis terkecuali sektor perbankan dan keuangan. Objek dalam penelitian ini yaitu (1) Karakteristik individu wajib pajak yang meliputi kualifikasi pendidikan, hubungan keluarga, pemahaman wajib pajak, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; (2) Karakteristik perusahaan yang meliputi ukuran perusahaan, kemampuan, *leverage*, masa terdaftar dan kompleksitas usaha serta; (3) Struktur kepemilikan yang meliputi struktur kepemilikan asing, dan struktur kepemilikan publik, selanjutnya; (4) Tingkat kepatuhan pajak yang meliputi surat pemberitahuan, tunggakan pajak, sanksi pajak, pemeriksaan dan ketetapan pajak. Periode yang digunakan yaitu periode 2007.

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survai (*survey design*). Pengertian desain survai menurut Ibnu Subiyanto (2004) adalah suatu perancangan penelitian dengan tujuan melakukan pengujian yang cermat dan teliti terhadap suatu objek penelitian berdasarkan situasi atau kondisi tertentu dengan melihat kesesuaiannya dengan pernyataan ataupun nilai tertentu. Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif.

Populasi dalam penelitian adalah data yang bersumber dari perusahaan berbagai sektor yang tercatat di BEJ dan terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Jakarta dengan dasar Indonesian Capital Market Directory 2007. Data dari perusahaan sebagai sampel diperoleh melalui kuesioner yang ditujukan kepada direktur keuangan, serta data dari Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa berupa data sekunder.

Berdasarkan data pada KPP Perusahaan Masuk Bursa Jakarta dalam tahun 2007, yaitu wajib pajak terdaftar sebagai wajib pajak non perbankan dan keuangan sejumlah 130 wajib pajak. Kuesioner yang dikirim kepada 130 responden, kuesioner yang kembali sebanyak 102 kuesioner sehingga dalam penelitian ini semua hasil kuesioner yang diterima digunakan untuk melakukan pengujian dan data tersebut sebagai data primer.

Operasionalisasi Variabel Penelitian. Pengukuran terhadap variabel penelitian dilakukan dengan cara menguraikan variabel penelitian ke dalam operasionalisasi variabel penelitian yang terdiri dari: sub variabel. Masing-masing variabel beserta sub variabel, konsep, dan indikator disusunlah kuesioner untuk menggali informasi lebih lanjut dari setiap variabel dengan menggunakan skala likert 1 s/d 5. Skala 1 menunjukkan yang lebih baik, dan skala 5 menunjukkan yang lebih rendah, oleh karena itu analisis data dengan menggunakan metode Analisa Regresi Berganda harus menggunakan skala ordinal.

Analisis Data. Berdasarkan data primer dan data sekunder, peneliti akan menganalisis dengan menggunakan analisis regresi (*regression analysis*) dan analisis komponen utama karena peneliti ingin mengetahui besaran dan bentuk struktur pengaruh dari karakteristik individu wajib pajak, karakteristik perusahaan, dan struktur kepemilikan terhadap kepatuhan pajak dan menyelidiki faktor-faktor dominan yang mempengaruhi karakteristik individu wajib pajak, karakteristik perusahaan, dan struktur kepemilikan. Seluruh data yang telah terkumpul ditabulasikan sesuai dengan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Setiap variabel karakteristik individu wajib pajak, karakteristik perusahaan, dan struktur kepemilikan dilakukan transformasi melalui analisis komponen utama (*principal component analysis*).

Dillon dan Goldstein (1984) menyatakan komponen utama pertama atau PC_1 , menjelaskan varian data terbanyak disusul dengan kedua (PC_2) dan seterusnya sampai PC_m . Jumlah varian yang dijelaskan adalah $\Sigma PC = 100\%$. Varian dimaksud menunjukkan suatu ukuran yang menggambarkan seberapa besar komponen PC_1 (karakteristik individu wajib pajak), PC_2 (karakteristik perusahaan) serta PC_3 (struktur kepemilikan) mengungkapkan apa yang dinyatakan variabel-variabel indikatornya.

Bentuk persamaan komponen utama sebagai berikut:

$$PC_1 = w(1)1X_1 + w(1)2X_2 + w(1)3X_3 + w(1)4X_4 + w(1)pX_5$$

$$PC_2 = w(2)1X_1 + w(2)2X_2 + w(2)3X_3 + w(2)4X_4 + w(2)pX_5$$

$$PC_3 = w(m)1X_1 + w(m)2X_2$$

Persamaan PC_1 yang akan dipilih karena akan menghasilkan varian terbesar dalam arti dapat menyerap informasi maksimum X_1 sampai X_5 . Data yang direduksi melalui *Principal Component Analysis* (PCA) dalam penelitian ini adalah: (1) variabel karakteristik individu wajib pajak yang terdiri dari kualifikasi pendidikan, hubungan keluarga, pemahaman wajib pajak, penggunaan teknologi informasi, dan komunikasi; (2) variabel karakteristik perusahaan yang terdiri dari ukuran perusahaan, kemampuan, *leverage*, masa terdaftar, dan kompleksitas usaha; dan (3) variabel struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan publik, dan kepemilikan asing.

Untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel Karakteristik Individu wajib pajak, Karakteristik Perusahaan, dan Struktur Kepemilikan terhadap kepatuhan pajak peneliti menggunakan model regresi linier, adapun persamaan regresi linier itu adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan: Y = Kepatuhan Pajak; β_0 = Koefisien *Intercept*; β_j = Koefisien; Regresi; $j = 1, 2, 3$; X_1 = Karakteristik Individu; X_2 = Karakteristik Perusahaan; X_3 = Struktur Kepemilikan; ε = Variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian

Metode penaksiran yang akan digunakan untuk menentukan b_0, b_1, b_2, b_3 pada persamaan sebagai taksiran dari $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ adalah metode kuadrat terkecil (OLS), yaitu suatu metode penaksir parameter model regresi dengan jalan meminimumkan jumlah kuadrat

kekeliruan. Metoda kuadrat terkecil vektor parameter b dapat dihitung dengan rumus umum sebagai berikut:

$$\beta = (X'X)^{-1} X'Y$$

di mana: $(X'X)^{-1}$ = Invers dari $(X'X)$; X' = transpose matriks kofaktor X ;

Koefisien regresi β akan bernilai positif (+) apabila menunjukkan hubungan searah antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Hal ini berarti kenaikan variabel bebas akan mengakibatkan kenaikan variabel tak bebas, begitu pula sebaliknya apabila variabel bebas mengalami penurunan. Untuk nilai β akan bernilai negatif (-) apabila menunjukkan hubungan yang berlawanan, yang berarti kenaikan variabel bebas akan mengakibatkan penurunan variabel tak bebas, begitu pula sebaliknya apabila variabel bebas mengalami penurunan, maka variabel tak bebas akan mengalami kenaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis. Setelah dilakukan analisis terhadap instrumen penelitian, maka data yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk menganalisis dan menguji rumusan pengujian hipotesis berdasarkan struktur model antar variabel dalam penelitian. Dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan hubungan struktural variabel, akan dilakukan pengujian hipotesis.

Pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dilakukan melalui uji statistik analisis regresi linear berganda untuk mengetahui dan menguji pengaruh antar variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel karakteristik individu (X_1), variabel karakteristik perusahaan (X_2), variabel struktur modal (X_3) dan variabel tingkat kepatuhan (Y).

Data variabel karakteristik individu wajib pajak (X_1) yang dikumpulkan menggunakan kuisisioner yang mempunyai skala pengukuran ordinal, terlebih dahulu ditransformasikan menjadi skala interval menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI). Untuk variabel karakteristik individu (X_1), variabel karakteristik perusahaan (X_2) dan variabel struktur modal (X_3) dilakukan perhitungan analisis PCA (*Principal Component Analysis*). Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing indikator dalam variabel karakteristik individu wajib pajak (X_1), variabel karakteristik perusahaan (X_2) dan variabel struktur modal (X_3) serta untuk memperoleh skor masing-masing variabel yang akan digunakan untuk analisis selanjutnya (perhitungan regresi), pada bagian ini dijelaskan hasil perhitungan bobot untuk setiap indikator masing-masing variabel yang diteliti menggunakan *Principal Component Analysis*.

Faktor Komunikasi Dominan Dalam Membentuk Karakteristik Individu Wajib Pajak (Hipotesis Pertama). Pengujian hipotesis pertama untuk mengetahui apakah faktor komunikasi dominan dalam membentuk karakteristik individu wajib pajak. Dengan demikian harus diketahui terlebih dahulu seberapa besar kontribusi masing-masing indikator dalam variabel karakteristik individu wajib dengan menghitung bobot untuk setiap indikator masing-masing variabel yang diteliti menggunakan *Principal Component Analysis*.

Variabel karakteristik individu wajib pajak terdiri atas lima faktor yaitu kualifikasi pendidikan ($X_{1.1}$), hubungan keluarga ($X_{1.2}$), pemahaman wajib pajak ($X_{1.3}$), penggunaan teknologi informasi ($X_{1.4}$), dan komunikasi ($X_{1.5}$). Hasil perhitungan menggunakan

software *Preliis-Lisrel* versi 8.3, diperoleh nilai *loading* atau bobot dari kelima Faktor pada lima buah komponen utama.

Komponen utama I dapat menjelaskan 80,25 % variasi lima faktor pembentuk variabel karakteristik individu wajib pajak, berarti 80,25 % dari kelima faktor dapat terwakili dengan menggunakan komponen utama pertama dan selanjutnya akan digunakan sebagai ukuran dari variabel karakteristik individu wajib pajak.

Tabel 1. Hasil Komponen Utama Variabel Karakteristik Individu Wajib Pajak

Indikator	Komponen Utama				
	I	II	III	IV	V
Kualifikasi pendidikan ($X_{1,1}$)	0.521	0.627	-0.567	-0.085	-0.084
Hubungan keluarga ($X_{1,2}$)	0.259	-0.152	-0.126	0.528	0.785
Pemahaman wajib pajak ($X_{1,3}$)	0.508	0.307	0.804	-0.006	0.025
Penggunaan teknologi informasi ($X_{1,4}$)	0.341	-0.338	-0.063	0.627	-0.61
Komunikasi ($X_{1,5}$)	0.535	-0.613	-0.111	-0.567	0.069
Akar Ciri (Keragaman)	28.37	3.18	2.4	0.98	0.42
Keragaman Total (%)	80.25	9.01	6.79	2.77	1.18
Keragaman kumulatif (%)	80.25	89.25	96.04	98.82	100

Hasil perhitungan bobot faktor kualifikasi pendidikan ($X_{1,1}$) sebesar 0,521, faktor hubungan keluarga ($X_{1,2}$) sebesar 0,259, faktor pemahaman wajib pajak ($X_{1,3}$) sebesar 0,508, faktor penggunaan teknologi informasi ($X_{1,4}$) sebesar 0,341 dan faktor komunikasi ($X_{1,5}$) sebesar 0,535. Berdasarkan hasil perhitungan pembobotan tersebut, karakteristik individu wajib pajak mempunyai nilai bobot sebagai berikut :

$$KI = 0,521 X_{1,1} + 0,259 X_{1,2} + 0,508 X_{1,3} + 0,341 X_{1,4} + 0,535 X_{1,5}$$

KI = Karakteristik individu wajib pajak

Nilai bobot yang diperoleh menjelaskan urutan indikator dari yang paling besar kontribusinya dalam variabel sistem variabel karakteristik individu wajib pajak adalah faktor komunikasi ($X_{1,5}$), kualifikasi pendidikan ($X_{1,1}$), pemahaman wajib pajak ($X_{1,3}$), penggunaan teknologi informasi ($X_{1,4}$) dan hubungan keluarga ($X_{1,2}$). Dari faktor tersebut terlihat bahwa faktor komunikasi mempunyai bobot terbesar dibanding faktor yang lainnya. Dari hasil perhitungan dan pengujian tersebut dengan menggunakan *Principal Component Analysis*, maka hipotesis pertama yaitu "faktor komunikasi dominan dalam membentuk karakteristik individu wajib pajak " dapat diterima artinya hasil penelitian mendukung hipotesis yang diajukan.

Faktor Kemampulabaan Dominan Dalam Membentuk Karakteristik Perusahaan (Hipotesis Kedua). Pengujian hipotesis kedua untuk mengetahui apakah faktor kemampulabaan dominan dalam membentuk karakteristik perusahaan. Dengan demikian harus diketahui terlebih dahulu seberapa besar kontribusi masing-masing indikator dalam variabel karakteristik perusahaan dengan menghitung bobot untuk setiap indikator masing-masing variabel yang diteliti menggunakan *Principal Component Analysis*.

Hasil perhitungan menggunakan software *Preliis-Lisrel*, diperoleh nilai *loading* atau bobot dari kelima faktor pada lima buah komponen utama seperti pada Tabel 2. berikut:

Tabel 2. Hasil Komponen Utama Variabel Karakteristik Perusahaan

Indikator	Komponen Utama				
	I	II	III	IV	V
Ukuran perusahaan ($X_{2.1}$)	0.493	-0.155	0.032	0.728	-0.449
Kemampulabaan ($X_{2.2}$)	0.496	-0.045	-0.289	-0.644	-0.504
<i>Leverage</i> ($X_{2.3}$)	0.477	-0.078	0.805	-0.204	0.277
Masa terdaftar ($X_{2.4}$)	0.202	0.976	-0.01	0.081	0.015
Kompleksitas usaha ($X_{2.5}$)	0.492	-0.124	-0.518	0.085	0.684
Akar ciri (Keragaman)	3.59	0.90	0.25	0.16	0.11
Keragaman total (%)	71.79	17.91	4.99	3.16	2.16
Keragaman kumulatif (%)	71.79	89.7	94.69	97.84	100

Komponen utama pertama yang dapat menjelaskan 71,79 % variasi lima faktor pembentuk variabel karakteristik perusahaan, yang berarti bahwa 71,79 % dari kelima faktor dapat terwakili dengan menggunakan komponen utama pertama dan selanjutnya akan digunakan sebagai ukuran dari variabel karakteristik perusahaan. Hasil perhitungan bobot faktor ukuran perusahaan ($X_{2.1}$) sebesar 0,493, faktor kemampulabaan ($X_{2.2}$) sebesar 0,496, faktor *leverage* ($X_{2.3}$) sebesar 0,477, faktor masa terdaftar ($X_{2.4}$) sebesar 0,202 dan faktor kompleksitas usaha ($X_{2.5}$) sebesar 0,492. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian hipotesis tersebut, karakteristik perusahaan mempunyai bobot sebagai berikut:

$$KP = 0,493 X_{2.1} + 0,496 X_{2.2} + 0,477 X_{2.3} + 0,202 X_{2.4} + 0,492 X_{2.5}$$

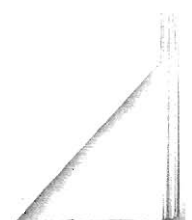
KP = Karakteristik Perusahaan

Nilai bobot yang diperoleh menjelaskan urutan indikator dari yang paling besar kontribusinya dalam variabel karakteristik perusahaan yaitu faktor kemampulabaan ($X_{2.2}$), ukuran perusahaan ($X_{2.1}$), kompleksitas usaha ($X_{2.5}$), *leverage* ($X_{2.3}$) dan masa terdaftar ($X_{2.4}$). Dari faktor tersebut terlihat bahwa faktor kemampulabaan mempunyai bobot terbesar dibanding faktor yang lainnya. Dari hasil perhitungan dan pengujian tersebut dengan menggunakan *Principal Component Analysis*, maka hipotesis kedua yaitu "faktor kemampulabaan dominan dalam membentuk karakteristik perusahaan" dapat diterima artinya hasil penelitian mendukung hipotesis yang diajukan.

Hasil perhitungan menggunakan software *Preliis-Lisrel*, diperoleh nilai *loading* atau bobot dari kedua faktor pada dua buah komponen utama seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Komponen Utama Variabel Struktur Kepemilikan

Indikator	Komponen Utama	
	I	II
Kepemilikan publik ($X_{3.1}$)	-0.707	0.707
Kepemilikan asing ($X_{3.2}$)	0.707	0.707
Akar ciri (Keragaman)	100.0	0.0
Keragaman total (%)	100.0	0.0
Keragaman kumulatif (%)	100.0	100.0



Berdasarkan persamaan regresi dan Tabel *output* uji t, pengaruh variabel karakteristik perusahaan terhadap tingkat kepatuhan pajak dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak

β	t_{hitung}	t_{tabel}	Koefisien Standarisasi β
3,064	4.865	1.984	0.353

Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai $t_{hitung} = 4.865$ lebih besar dari t_{tabel} untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas = 98 % sebesar 1,984, sehingga dapat diambil keputusan menolak H_0 dan menerima H_1 , hal ini berarti berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan dari karakteristik perusahaan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Semakin baik karakteristik perusahaan, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.
2. Nilai koefisien standarisasi sebesar 0,353 menunjukkan koefisien pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Selanjutnya diperoleh besarnya pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tingkat kepatuhan pajak yaitu -27 %.

Berdasarkan persamaan regresi dan Tabel *output* uji t, pengaruh variabel n struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan pajak dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak

β	t_{hit}	t_{tab}	Koefisien Standarisasi β
0,127	4.021	1.984	0.245

Berdasarkan Tabel 4 dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama. Nilai $t_{hitung} = 4.021$ lebih besar dari t_{tabel} untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas = 98 sebesar 1,984, sehingga dapat diambil keputusan menolak H_0 dan menerima H_1 , hal ini berarti berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan dari struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Semakin baik struktur kepemilikan maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. **Kedua,** Nilai koefisien standarisasi sebesar 0,245 menunjukkan koefisien pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Selanjutnya diperoleh besarnya pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan yaitu 14,8%.

Secara keseluruhan dari keempat hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, memberikan hasil yang cukup meyakinkan, di mana hasil *Principal Component Analysis* dari indikator-indikator ketiga variabel yaitu karakteristik individu wajib pajak, karakteristik perusahaan, dan struktur kepemilikan dapat membentuk masing-masing 80,25 %, 71,79% dan 100%. Artinya variasi masing-masing faktor pembentuk variabel karakteristik individu wajib pajak, karakteristik perusahaan, dan struktur kepemilikan dapat terwakili dengan menggunakan komponen utama pertama dan selanjutnya akan digunakan sebagai ukuran variabel selanjutnya. Selain itu faktor yang dominan dari masing-masing variabel tersebut di antaranya faktor komunikasi, faktor kemampuan, dan faktor kepemilikan asing sangat mendukung terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

PENUTUP

Faktor yang membentuk karakteristik individu wajib pajak meliputi: Kualifikasi Pendidikan, Hubungan Keluarga, Pemahaman Wajib Pajak, Penggunaan Teknologi Informasi, Komunikasi. Faktor Komunikasi merupakan faktor yang dominan membentuk karakteristik individu wajib pajak. Faktor kemampuan dominan dalam membentuk karakteristik perusahaan. Faktor lainnya seperti ukuran perusahaan dan kompleksitas usaha juga dapat membentuk karakteristik perusahaan tetapi relatif lebih kecil dibanding dengan kemampuan.

Dari perhitungan bobot faktor kepemilikan publik diperoleh hasil bahwa faktor kepemilikan asing dominan membentuk struktur kepemilikan.

Karakteristik individu wajib pajak, karakteristik perusahaan, dan struktur kepemilikan mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak baik secara parsial maupun simultan. Sedangkan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh karakteristik individu wajib pajak, karakteristik perusahaan, dan struktur kepemilikan secara simultan atau bersama-sama sebesar 74,9%, sisanya 25,1% dipengaruhi faktor lain yang tidak diamati Variabel-variabel lain yang tidak diteliti sebagai contoh variabel akuntabilitas kebijakan.

Mengacu kepada simpulan hasil penelitian, dapat disarankan: (1) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam bentuk pelayanan administrasi perpajakan, transformasi informasi dan meningkatkan komunikasi kepada wajib pajak; (2) Perlu komitmen dalam membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mendukung terciptanya *good governance* dan transparansi wajib pajak serta transparansi otoritas pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Alm., James., Andrew Young., Michael Mc Kee. (2002). *The Effect of Communication Among Tax Payers on Compliance*, School of Policy Studies, Georgia of Business, University of Colorado at Boulder: Department of Economics University of Tennessee at Knoxville.
- Andreoni, James, Brian Erard and Jonathan Feinstein. (1998). Tax Compliance : *Journal of Economic Literature*, Vol. 36, p:818-819.
- Araujo, Enrique. (1995). The Impact of The Level of effectiveness of Tax Administration The Human Factor, Paper and Report Voluntary Compliance with Obligation and Taxpayers Education, Technical General Assembly on The Inter-American Center of Tax Administration, *International Fiscal Documentation*, Amsterdam.
- Brooks, Neil. (2001). *Presentation Paper of Key Issue in Income Tax: Challenges of Tax Administration and Compliance*, Tax Conference, Asian Development Bank Institute, Tokyo.
- Chang, Gym Park. Jin Kwon Hyunilteo Yoo. (2002). *The Determinants of Tax Compliance by Experimental Data: A Case of Korea*. Korea Institute of Public Finance.
- Donalson, L. and Davis, J.h. (1999). Stewardship Theory or Agency Theory: CLO Governance and Shareholder Returns, *Australian Journal of Management*, 16.1, p:49-63.

- El-Gazzar, SM. (1998). *Predisclosure Information and Institutional Ownership: A Cross Section Examination of Market Revaluation during Earnings Announcement Periods*, *The Accounting Review* 73(1):119-129.
- Felber, Gunter, (2003). *Asian Good Practice to Fight Corruption*, Makalah Seminar Internasional, Le Meridien Hotel, Jakarta.
- Grace, M., Ireland, A and Dunstan, K. (1995). Board Composition, Non-Executive Directors Characteristics and Corporate Financial Performance, *Asia-Pacific Journal of Accounting*, Dec, p:121-137.
- Gunadi, (2004). *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance*, Pidato Pengukuhan pada Upacara Pemberian Jabatan Guru Besar Luar Biasa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Hasseldine, John. (1993). How do Revenue Audits Affect Taxpayer Compliance?, *Bulletin for International Bureau of Fiscal Documentation*, Vol. 47 No. 7/8 July/August.
- Hung Chan., K., Phyllis Lai-Lan Mo. (2000). *Tax Holiday and Tax Non-Compliance: An Empirical Study of Corporate Tax Audit in China's Developing Economy*, Lingnan University, Hongkong.
- Ida, Laode. (2003). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemberdayaan Pelayanan Publik*, Forum Inovasi – Capability Building & Good Governance.
- Jenkins, Glen and Edwin N Forlemu. (1992). *Enhancing Voluntary Compliance*, Harvard University Cambridge.
- Jones, Sally M. (2004). *Principal of Taxation for Business and Investment Planning*.
- Koeswara, E. (1998). *Motivasi, Teori dan Penelitiannya*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- Lang, M. and Lundholm, R. (1993). Cross-Sectional Determinants of Analyst Rating of Corporate Disclosure, *Journal of Accounting Research* 31 (2): 246-271.
- Macho Stadler, Ines and J. David Perez Castrillo. (2000). *Auditing With Signal*, Universitat Autònoma de Barcelona.
- Na'im, Ainun dan Fu'ad Rakhman. (2000). Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Volume 15 No. 1 Januari, p:71-82.
- Porwal, LS. (2002). *Accounting Theory, An Introduction, Third Edition*, Tata McGrawhill Publishing Company Limited, New Delhi.
- Robbins, Stephens P. (2007). *Organization Behavior*, 16th Edition, Prentice Hall, Inc.
- Sekaran, Uma.. (2003). *Research Methods For Business, A Skill Building Approach*, 4th Edition, John Wiley and Sons, Inc.
- Toshiyuki Fushimi. (2001). *Administrasi Perpajakan yang semestinya (Semoga Administrasi Perpajakan di Indonesia Terus Berkembang)*, Japan International Corporation Agency, Japan.